KEBERLANJUTAN PROGRAM KELURAHAN TANGGUH BENCANA DI KELURAHAN KASEMEN KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

Imam Prayogo
NPP. 33.0594
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik
Email : imamprayogo213@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Agus Supriadi Harahap, M.Si
Email: agusharahap@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The author focuses on the Disaster-Resilient Village Program (Kelurahan Tangguh Bencana/Keltana) in Kasemen Village, which has been established since 2018; however, flood disasters continue to recur, causing casualties and significant losses. This condition indicates that the program, which is intended to build community independence and preparedness, has not yet been implemented in a fully sustainable manner. Previous studies have examined the effectiveness and institutional capacity of Keltana in various regions, but none has specifically analyzed the sustainability of the Keltana program in Kasemen Village using Bamberger and Cheema's (1990) program sustainability theoretical framework.* ***Purpose:*** *This study aims to describe and analyze the sustainability of the Disaster-Resilient Village Program (Kelurahan Tangguh Bencana) in Kasemen Village, Kasemen District, Serang City, Banten Province.* ***Method:*** *The research used a qualitative descriptive approach with an inductive method. Data collection was conducted through field observations and in-depth interviews with four informants the Head of the Serang City BPBD, the Kasemen Sub-district Head, the Kasemen Village Head, and the local community, along with documentation as supporting data. Data analysis was conducted through the stages of data organization, coding, thematic description, and interpretation.* ***Result:*** *The results indicate that the Keltana program in Kasemen Village has not been implemented in a sustainable manner across all four dimensions of Bamberger and Cheema's (1990) program sustainability theory. Community participation remains passive, as training is designed entirely in a top-down manner by BPBD without involving the community in the planning process. Institutional capacity is not yet independent, as the village administration still relies heavily on technical guidance, equipment, and funding from BPBD. Resource management represents the most critical dimension, as the village has no independent budget and all financing depends entirely on BPBD, whose own capacity is also limited. Monitoring and evaluation are conducted only reactively following disasters, are not inclusive, and have not been followed up with concrete program improvements.* ***Conclusion:*** *The sustainability of the Keltana program in Kasemen Village cannot be achieved without a fundamental shift from a top-down approach toward the decentralization of authority, budget, and technical capacity to the village level, accompanied by participatory, routine, and genuinely followed-up evaluation mechanisms.*

Keywords: *Community Based Disaster Management; Community Participation; Disaster Resilient Village Program; Program Sustainability.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penulis berfokus pada program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) di Kelurahan Kasemen telah terbentuk sejak tahun 2018, namun bencana banjir masih terus berulang dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian yang besar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program yang seharusnya mampu membangun kemandirian dan kesiapsiagaan masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara berkelanjutan. Pergeseran paradigma penanggulangan bencana kini tidak lagi terfokus pada penanganan kedaruratan semata, melainkan beralih menuju manajemen kesiapsiagaan yang menekankan pengurangan risiko bencana melalui pengorganisasian dan partisipasi aktif masyarakat (Nurrahman et al., 2022). Penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas dan kapasitas kelembagaan Keltana di berbagai daerah, namun belum ada kajian yang secara khusus menganalisis keberlanjutan program Keltana di Kelurahan Kasemen menggunakan kerangka teori keberlanjutan Bamberger dan Cheema (1990). **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis keberlanjutan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada kepada (4 informan) yaitu Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Camat Kasemen, Lurah Kasemen, dan masyarakat setempat serta dengan dokumentasi sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengorganisasian data, pengkodean, deskripsi tematik, dan interpretasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Keltana di Kelurahan Kasemen belum berjalan secara berkelanjutan pada keempat dimensi teori keberlanjutan program menurut Bamberger dan Cheema (1990). Partisipasi masyarakat masih bersifat pasif karena pelatihan dirancang sepenuhnya secara top down oleh BPBD tanpa pelibatan masyarakat dalam perencanaan. Kapasitas lembaga belum mandiri karena kelurahan masih sangat bergantung pada arahan teknis, peralatan, dan pendanaan dari BPBD. Pengelolaan sumber daya menjadi dimensi paling kritis karena kelurahan tidak memiliki anggaran mandiri dan seluruh pembiayaan bertumpu pada BPBD yang kapasitasnya pun terbatas. Pemantauan dan evaluasi hanya dilakukan secara reaktif pasca bencana, belum inklusif, dan belum ditindaklanjuti dengan perbaikan program yang nyata. **Kesimpulan:** Keberlanjutan program Keltana di Kelurahan Kasemen tidak dapat terwujud tanpa pergeseran mendasar dari pendekatan top-down menuju desentralisasi kewenangan, anggaran, dan kapasitas teknis kepada kelurahan, disertai mekanisme evaluasi yang partisipatif, rutin, dan benar-benar ditindaklanjuti.

Kata kunci: Keberlanjutan Program; Kelurahan Tangguh Bencana; Manajemen Bencana Berbasis Komunitas; Partisipasi Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana didefinisikan sebagai gangguan serius terhadap fungsi suatu komunitas atau masyarakat dalam skala apapun yang disebabkan oleh peristiwa berbahaya yang berinteraksi dengan kondisi keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas, sehingga mengakibatkan kerugian dan dampak pada aspek manusia, material, ekonomi, dan lingkungan (Shi et al., 2020). Gangguan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan hidup yang secara keseluruhan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat. Manajemen bencana mencakup siklus mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang keseluruhannya bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Tanggung jawab ini pada dasarnya melekat pada fungsi dasar pemerintahan, yaitu menciptakan dan memelihara ketertiban yang memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari secara normal dan layak (Labolo, 2014).

Perlindungan tersebut dapat dilakukan secara langsung, seperti pengerahan tim SAR untuk evakuasi korban, maupun tidak langsung melalui penyusunan regulasi dan kebijakan yang bertujuan menjaga keselamatan masyarakat (Eviany, 2023). Mitigasi mengembangkan langkah-langkah dan sumber daya manajemen bencana struktural maupun nonstruktural guna mencegah dan membatasi dampak bencana. Kesiapsiagaan mempersiapkan seluruh personel, fasilitas, perlengkapan, dan rencana tindakan untuk menghadapi kejadian darurat (Cao, 2023). Konsep masyarakat tangguh diwujudkan melalui pengembangan kelurahan tangguh bencana sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mengelola sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan di wilayahnya. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan program nasional berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mengelola risiko bencana, karena masyarakatlah yang pertama kali menerima dampak langsung dari bencana yang terjadi(Ginting & Wijayanti, 2019). Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dianggap sebagai inti dari setiap pendekatan pengurangan risiko. Hal in ini didefinisikan sebagai pendekatan yang berupaya untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas kelompok rentan dan masyarakat dalam menghadapi, mencegah, atau meminimalkan kerugian jiwa, harta benda, dan lingkungan; meminimalkan penderitaan manusia; dan mempercepat pemulihan (Cantwell-Chavez, 2023).

Provinsi Banten yang letaknya berdekatan dengan patahan Sumatera dan termasuk dalam Ring of Fire menghadapi beragam ancaman bencana mulai dari tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, puting beliung, hingga kebakaran. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten memiliki 6 kecamatan dan 67 kelurahan, dan berdasarkan data rekapitulasi peristiwa bencana alam periode tahun 2020–2024, banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kota Serang. Di antara seluruh kecamatan yang ada, Kecamatan Kasemen menjadi wilayah yang paling sering terdampak banjir, hal ini disebabkan oleh limpasan air dari bendungan Sindangheula, penyempitan Sungai Cibanten akibat sedimentasi dan bangunan liar di bantaran sungai, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar. Kondisi tersebut mencapai puncaknya pada 1 Maret 2022 saat banjir besar melanda Kota Serang dan mengakibatkan 2.431 rumah terdampak, 2.900 warga mengungsi, serta enam warga meninggal dunia akibat tersengat listrik, hanyut, dan tertimpa bangunan yang roboh.

Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen telah dibentuk sejak tahun 2018 melalui serangkaian pelatihan dan simulasi evakuasi yang melibatkan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Namun meskipun program ini telah berjalan selama tujuh tahun, bencana banjir masih terus berulang dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian yang besar, yang mengindikasikan bahwa program belum sepenuhnya mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri dan siap menghadapi bencana. Kondisi ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa hambatan utama dalam program Kelurahan Tangguh Bencana di berbagai daerah meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta minimnya pelatihan yang bersifat praktis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, persoalan keberlanjutan program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen perlu dikaji lebih mendalam agar program tidak hanya berhenti sebagai program yang terbentuk di atas kertas, melainkan benar-benar mengakar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. kebijakan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Indonesia menegaskan bahwa program ini cenderung menempatkan aparatur kelurahan sebagai aktor utama sambil memperlakukan masyarakat sebagai penerima pasif, sehingga warga di wilayah rawan bencana tidak memiliki kerangka yang memadai untuk mengolah pengetahuan dan pengalaman kebencanaan secara mandiri (Arifin et al., 2021)

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Peneliti berfokus pada permasalahan belum berjalannya Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen secara berkelanjutan meskipun program tersebut telah terbentuk sejak tahun 2018, sementara bencana banjir masih terus berulang dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian yang besar bagi masyarakat. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama program sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, yaitu membangun kapasitas masyarakat agar mampu menghadapi ancaman bencana secara mandiri, terorganisir, dan berkelanjutan. Meskipun program telah berjalan selama tujuh tahun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat yang seharusnya menjadi aktor utama dalam pengelolaan risiko bencana justru belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prosedur yang ditetapkan. Kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realita pelaksanaan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini untuk mengkaji secara komprehensif mengapa program yang telah berjalan tujuh tahun belum mampu mewujudkan komunitas yang benar-benar mandiri dan tangguh terhadap bencana di Kelurahan Kasemen.

Dari sisi partisipasi masyarakat, terdapat kesenjangan antara harapan program yang menginginkan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan dengan kenyataan di lapangan di mana masyarakat Kelurahan Kasemen hanya berposisi sebagai penerima program yang pasif karena kegiatan pelatihan dan sosialisasi dirancang sepenuhnya secara top-down oleh BPBD tanpa pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan. Ketiadaan ruang bagi masyarakat untuk menentukan agenda kegiatan menjadikan mereka tidak merasa memiliki program, sehingga motivasi untuk terlibat aktif melemah dengan sendirinya dan program pun rentan berhenti begitu dukungan dari luar berkurang. Kesenjangan ini semakin nyata dari kenyataan bahwa materi pelatihan yang diselenggarakan masih lebih banyak berupa seminar dan sosialisasi teoritis tanpa praktik langsung di lapangan, sehingga masih ada warga yang lupa cara menggunakan peralatan atau bingung harus berbuat apa ketika bencana benar-benar terjadi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program dengan prinsip partisipasi bermakna yang seharusnya menjadi fondasi utama keberlanjutan sebuah program berbasis komunitas..

Dari sisi kapasitas lembaga, terdapat kesenjangan antara harapan program yang menginginkan kelurahan mampu mengelola program secara mandiri dengan kenyataan bahwa kelurahan masih sepenuhnya bergantung pada arahan teknis, peralatan, dan pendanaan dari BPBD Kota Serang dalam setiap aspek pelaksanaan program. Ketergantungan struktural ini menyebabkan program hanya hidup selama BPBD hadir dan aktif mendampingi, sehingga ketika dukungan BPBD berkurang seluruh kegiatan program ikut terhenti karena kelurahan tidak memiliki bekal yang cukup untuk melanjutkan program secara mandiri. Kesenjangan kapasitas ini semakin diperparah karena seluruh peralatan kebencanaan seperti perahu motor, pelampung rompi, dan tenda terpusat di BPBD, sehingga kelurahan tidak memiliki aset operasional sendiri dan harus meminjam setiap kali akan mengadakan latihan maupun menghadapi bencana. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara desain program yang menghendaki kelurahan sebagai unit yang mandiri dengan kenyataan kelembagaan yang justru memperkuat ketergantungan kelurahan pada lembaga di atasnya.

Dari sisi pengelolaan sumber daya, terdapat kesenjangan antara kebutuhan program akan sumber daya yang terkelola secara mandiri dan berkelanjutan dengan kenyataan bahwa Kelurahan Kasemen sama sekali tidak memiliki anggaran tersendiri untuk membiayai kegiatan program, dan seluruh pembiayaan bertumpu sepenuhnya pada BPBD yang kapasitasnya sendiri masih sangat terbatas untuk melayani 35 kelurahan tangguh bencana yang telah terbentuk di Kota Serang. Ketiadaan anggaran mandiri di tingkat kelurahan secara langsung berdampak pada tidak dapat dilakukannya pelatihan secara rutin, tidak dapat diadakannya peralatan secara mandiri, dan seluruh inisiatif program yang bergantung sepenuhnya pada jadwal yang ditetapkan oleh BPBD. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa kelurahan lebih mengandalkan semangat kekeluargaan dalam menjalankan program,

yang tidak dapat dijadikan substitusi bagi pengelolaan sumber daya yang terstruktur karena bersifat tidak menentu dan tidak dapat menjamin ketersediaan sumber daya secara konsisten pada saat dibutuhkan. Inilah kesenjangan struktural yang menjadi akar dari tidak berkembangnya kemandirian program di tingkat kelurahan dan yang paling mendesak untuk segera diatasi agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dari sisi pemantauan dan evaluasi, terdapat kesenjangan antara kebutuhan program akan sistem pemantauan yang rutin, inklusif, dan ditindaklanjuti secara nyata dengan kenyataan bahwa evaluasi di Kelurahan Kasemen hanya dilakukan secara reaktif setelah bencana terjadi tanpa jadwal yang terprogram secara berkala dan tanpa mekanisme tindak lanjut yang jelas. Absennya evaluasi berkala menyebabkan pelemahan kapasitas program yang berlangsung secara perlahan tidak dapat terdeteksi, sehingga masalah baru disadari setelah situasi darurat benar-benar terjadi dan sudah terlambat untuk diperbaiki. Kesenjangan ini diperparah oleh pelaporan evaluasi yang sepenuhnya bergantung pada saluran digital seperti grup WhatsApp dan media sosial BPBD, sehingga kelompok rentan seperti lansia, warga miskin, dan perempuan di wilayah pesisir yang justru paling terdampak bencana tidak dapat menjangkau informasi evaluasi tersebut dan suara mereka tidak pernah masuk ke dalam proses perbaikan program. Kesenjangan pada dimensi pemantauan dan evaluasi ini menjadi cermin dari kelemahan ketiga dimensi sebelumnya, karena tanpa sistem pemantauan yang berjalan dengan baik semua masalah pada dimensi partisipasi, kapasitas lembaga, dan pengelolaan sumber daya tidak akan pernah terdeteksi dan tertangani secara tepat waktu.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen telah berjalan sejak tahun 2018 namun bencana banjir masih terus berulang, sehingga dibutuhkan kajian empiris yang mendalam untuk mengetahui pada dimensi mana program mengalami kelemahan dan langkah perbaikan apa yang paling mendesak untuk dilakukan. Tanpa adanya kajian ini, pemerintah daerah dan BPBD Kota Serang akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami kondisi nyata program di lapangan sehingga perumusan strategi penguatan program berisiko tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, upaya membangun komunitas yang mandiri dan tangguh terhadap bencana di Kelurahan Kasemen berpotensi stagnan karena tidak didukung oleh data yang memadai untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret kepada BPBD Kota Serang dan pemerintah Kelurahan Kasemen agar program Kelurahan Tangguh Bencana benar-benar mengakar di tingkat komunitas dan tidak hanya ada secara administratif.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh (Lutfi & Magriasti, 2024)di Kota Padang membahas efektivitas program Kelurahan Tangguh Bencana oleh BPBD Kota Padang dan menemukan bahwa program belum sepenuhnya efektif akibat keterbatasan pendanaan, kekurangan personel, serta kurangnya pemantauan dan evaluasi formal yang mempersulit penilaian dampak jangka panjang program. Penelitian oleh (Arifa & Manurung, 2022) mengkaji kapasitas BPBD Kota Medan dalam program Keltana di Kelurahan Aur menggunakan teori kapasitas Grindle dan menemukan bahwa pelatihan relawan belum rutin, pemanfaatan personel belum maksimal akibat keterbatasan fasilitas dan peralatan, serta program belum mampu mengubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkontribusi pada peningkatan kerentanan terhadap banjir. Penelitian oleh (Danar et al., 2022) mengevaluasi Program Desa Tangguh Bencana di Desa Sirnoboyo dalam perspektif Flood Risk Management dan menemukan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat serta keterbatasan kapasitas tim relawan menjadi hambatan

utama meskipun komponen kesiapsiagaan bencana telah diterapkan. Berbeda dengan temuan (Hidayat et al., 2024) yang menemukan bahwa masyarakat di lokus penelitiannya sudah menunjukkan kesiapsiagaan yang cukup baik namun terkendala pada dukungan finansial dan infrastruktur, penelitian ini justru menemukan bahwa di Kelurahan Kasemen persoalannya lebih mendasar, yakni partisipasi masyarakat yang masih pasif dan ketergantungan struktural kelurahan terhadap BPBD yang menyebabkan program tidak dapat berjalan secara mandiri. Sama halnya dengan temuan (Humaeroh, 2025) bahwa keterbatasan alokasi anggaran dan minimnya infrastruktur pendukung menjadi hambatan utama program tangguh bencana di Kabupaten Pandeglang, penelitian ini juga menemukan hal serupa di Kelurahan Kasemen. Namun yang membedakan, penelitian ini menemukan bahwa persoalan anggaran di Kelurahan Kasemen bukan sekadar terbatas, melainkan sama sekali tidak tersedia di tingkat kelurahan karena seluruh pembiayaan bertumpu sepenuhnya pada BPBD, sehingga kelurahan tidak memiliki kendali apapun terhadap keberlangsungan programnya sendiri.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena secara khusus menggunakan kerangka teori keberlanjutan program menurut Bamberger dan Cheema (1990) yang mencakup empat dimensi yaitu partisipasi masyarakat, kapasitas lembaga, pengelolaan sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi, berbeda dengan penelitian Arifa dan Manurung (2022) yang menggunakan teori kapasitas Grindle maupun Danar dkk. (2022) yang menggunakan model evaluasi CIPP dan perspektif Flood Risk Management. Dari segi objek penelitian, penelitian ini secara khusus mengkaji keberlanjutan program Keltana di Kelurahan Kasemen, Kota Serang, yang memiliki karakteristik kebencanaan khas berupa banjir yang bersumber dari penyempitan Sungai Cibanten dan limpasan bendungan Sindangheula, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kota Padang, Kota Medan, Desa Sirnoboyo, maupun Kabupaten Pandeglang. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada konteks lokus yang merupakan salah satu kelurahan pertama yang membentuk program Keltana di Kota Serang sejak tahun 2018, sehingga menghasilkan temuan yang kontekstual dan spesifik terhadap kondisi lokal yang belum pernah dikaji sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa analisis keberlanjutan yang lebih komprehensif dan mendalam dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada efektivitas atau kapasitas kelembagaan semata.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Keberlanjutan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode induktif, di mana peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan ini dipilih karena persoalan keberlanjutan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui angka atau data statistik semata. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam hubungan, sikap, pandangan, serta dinamika yang sedang berlangsung secara alamiah di lapangan, sehingga kondisi nyata program dapat digambarkan secara utuh dan kontekstual. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai mengapa program yang telah berjalan tujuh tahun belum mampu mewujudkan komunitas yang mandiri dan tangguh terhadap bencana di Kelurahan Kasemen.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik yaitu observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi yang digunakan secara bersamaan untuk memperoleh data yang komprehensif dan dapat dipercaya. Sumber data dalam penelitian ini mencakup segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dan dapat memberikan informasi relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang dibedakan menjadi data primer melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder berupa dokumen dan laporan program (Simangunsong, 2017). Observasi partisipatif dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati proses pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana, kondisi fasilitas dan infrastruktur pendukung kesiapsiagaan bencana, serta dinamika keterlibatan masyarakat dalam program tersebut. Wawancara terstruktur dilakukan kepada informan yang dipilih secara purposive berdasarkan peran dan keterlibatan langsungnya dalam program, yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang, Camat Kasemen, Lurah Kasemen, dan masyarakat setempat. Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan 4 informan yang terdiri dari 3 informan kunci yaitu Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Camat Kasemen, dan Lurah Kasemen, serta 1 informan pendukung dari unsur masyarakat setempat yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap program Kelurahan Tangguh Bencana hal ini yang menjadi perwakilan dari masayarakat yaitu ketua RW. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan berbagai bahan kualitatif berupa dokumen publik, laporan program, data sarana dan prasarana BPBD, serta data kelurahan tangguh bencana yang ada di Kota Serang sebagai data pendukung yang memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Creswell yang terdiri dari mengorganisasikan dan menyiapkan data, membaca dan menelaah seluruh data, membuat pengkodean, menggunakan koding sebagai bahan deskripsi, menghubungkan antartema, serta memberikan interpretasi dan makna terhadap tema yang ditemukan. Keabsahan data dijaga melalui uji kredibilitas yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari berbagai informan yaitu BPBD, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat, serta membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan. Analisis dalam penelitian ini mengacu pada teori keberlanjutan program menurut Bamberger dan Cheema (1990) yang mencakup empat dimensi yaitu partisipasi masyarakat, kapasitas lembaga, pengelolaan sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi sebagai kerangka untuk memahami sejauh mana program yang sudah terbentuk sejak 2018 berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat pada titik mana program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen paling perlu diperkuat agar program tidak hanya ada di atas kertas tetapi benar-benar berjalan secara berkelanjutan.

Penelitian ini dilaksanakan di tiga lokasi utama, yaitu Kelurahan Kasemen sebagai lokus utama penelitian, Kantor BPBD Kota Serang, dan Kantor Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Pemilihan Kelurahan Kasemen sebagai lokus didasarkan pada dua pertimbangan utama seperti kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan pertama yang membentuk program Keltana di Kota Serang sejak tahun 2018 dan Kecamatan Kasemen merupakan wilayah yang paling sering terdampak bencana banjir di antara seluruh kecamatan yang ada di Kota Serang, sehingga relevansi kajian keberlanjutan program menjadi sangat tinggi. Pengumpulan data dilaksanakan selama satu bulan, yaitu pada bulan Januari 2026, mencakup proses observasi lapangan, pelaksanaan wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumentasi kegiatan program, sesuai dengan kalender akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2025/2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis keberlanjutan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen menggunakan teori keberlanjutan program menurut (Bamberger & Cheema, 1990) yang

mencakup empat dimensi yaitu partisipasi masyarakat, kapasitas lembaga, pengelolaan sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang telah membentuk Kelurahan Tangguh Bencana secara bertahap sejak tahun 2018 dan hingga saat ini telah terbentuk 35 kelurahan tangguh bencana dari 64 kelurahan yang ada di Kota Serang, dengan Kelurahan Kasemen sebagai salah satu kelurahan yang pertama kali dibentuk. Pembentukan kelurahan tangguh bencana di Kota Serang dilakukan berdasarkan tingkat kerawanan kelurahan tersebut terhadap bencana, dan upaya untuk menunjang keberlanjutan program dari kelurahan tangguh bencana yang sudah dibentuk sangat diperlukan agar masyarakat yang menjadi korban pertama dapat mengurangi risiko bencana secara nyata. Namun berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, tidak semua bidang dalam struktur organisasi Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen memiliki sarana dan prasarana yang sesuai, sehingga berjalannya program tidak berjalan secara maksimal sesuai dengan prosedur dari Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012.

3.1. Partisipasi Masyarakat

Dalam teori keberlanjutan program, partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama keberlanjutan sebuah program karena program yang tidak memberi ruang nyata bagi masyarakat untuk ikut menentukan arah dan jalannya kegiatan cenderung mati begitu bantuan dari luar berhenti. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Kasemen cukup antusias dengan adanya program Kelurahan Tangguh Bencana, yang terlihat dari kesediaan masyarakat untuk menjadi anggota program serta respons positif yang disampaikan oleh seluruh informan termasuk Kepala Pelaksana BPBD, Camat Kasemen, dan Lurah Kasemen. Namun jika dikaji menggunakan kerangka Bamberger dan Cheema (1990), antusiasme tersebut belum memenuhi syarat partisipasi yang sesungguhnya karena data lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Kasemen masih bersifat pasif, di mana masyarakat hadir dalam kegiatan tetapi tidak ikut menentukan agenda program. Kondisi ini terjadi karena kegiatan yang dilakukan bersifat dari atas ke bawah, pelatihan dan sosialisasi dirancang sepenuhnya oleh BPBD lalu masyarakat diundang untuk hadir, tanpa ada mekanisme yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan menentukan arah program.

Persoalan partisipasi juga berkaitan erat dengan relevansi materi pelatihan yang diselenggarakan, di mana kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Kasemen lebih banyak berupa seminar dan sosialisasi kebencanaan yang bersifat umum dan belum dikaitkan secara langsung dengan ancaman nyata yang dihadapi warga yaitu banjir rob dari Sungai Cibanten. Ketika materi pelatihan tidak relevan dengan pengalaman dan kekhawatiran sehari-hari warga, motivasi untuk terlibat secara aktif melemah dengan sendirinya, dan hal ini terkonfirmasi dari pengakuan Kepala Pelaksana BPBD yang menyebutkan bahwa ketika bencana benar-benar terjadi masih ada warga yang lupa cara menggunakan alat atau bingung harus berbuat apa. Selain itu pendekatan program juga belum inklusif bagi kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan anak-anak yang jumlahnya besar di Kecamatan Kasemen, padahal kelompok inilah yang paling terdampak ketika bencana terjadi dan paling membutuhkan perlindungan dalam setiap tahapan program. Absennya inklusivitas ini memperlemah basis partisipasi secara keseluruhan karena justru kelompok yang paling terdampak bencana tidak terwakili dalam proses program sehingga program Pergeseran dari partisipasi pasif menuju keterlibatan aktif dan bermakna memerlukan perubahan pendekatan yang terencana, dari sosialisasi satu arah menjadi perencanaan yang benar-benar partisipatif dengan melibatkan warga dalam menyusun rencana kontinjensi tingkat kelurahan dimulai dari forum kecil di tingkat RW. Pembentukan kelompok siaga di tingkat RT atau RW dengan agenda kerja mandiri tanpa selalu menunggu instruksi BPBD juga perlu dilakukan agar masyarakat dapat melakukan simulasi kecil secara rutin, memperbarui daftar warga rentan, dan memantau kondisi lingkungan secara proaktif. Mekanisme evaluasi partisipatif setelah setiap kegiatan juga wajib diadakan agar warga dapat menyampaikan

penilaian nyata dan hasil masukan dikembalikan kepada BPBD untuk perencanaan berikutnya, sehingga masyarakat merasakan bahwa suaranya benar-benar didengar dan dimanfaatkan. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif tersebut, keberlanjutan program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen dapat dibangun di atas fondasi yang kuat yaitu keterlibatan nyata masyarakat sebagai aktor utama bukan sekadar penerima program. tidak benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

3.2. Kapasitas Lembaga

Kapasitas lembaga yang terlibat dalam pengelolaan program sangat mempengaruhi keberlanjutan Program Kelurahan Tangguh Bencana, di mana BPBD Kota Serang memegang peranan penting dalam menyediakan dukungan administratif, finansial, serta teknis untuk kelangsungan program di Kelurahan Kasemen. Struktur organisasi Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen telah terbentuk dengan cukup jelas dan melibatkan banyak pihak seperti BPBD sebagai koordinator utama, perangkat kelurahan, dan masyarakat yang bergabung secara sukarela dengan Lurah Kasemen sebagai ketua dan keanggotaan yang tercatat secara resmi melalui surat keanggotaan. Namun jika dikaji menggunakan teori keberlanjutan program Bamberger dan Cheema (1990), kapasitas lembaga di Kelurahan Kasemen belum memenuhi syarat keberlanjutan yang sesungguhnya karena lembaga yang kuat bukan hanya soal jumlah personel atau ketersediaan struktur organisasi secara formal, tetapi juga menyangkut kejelasan wewenang, kestabilan anggaran, dan kemampuan untuk berkoordinasi secara efektif. Ketergantungan Kelurahan Kasemen pada BPBD bukan kebetulan semata, melainkan berakar pada struktur yang menjadikan BPBD sebagai penentu utama segala urusan program dari rencana kegiatan sampai peralatan dan pelatihan, sehingga kelurahan tidak memiliki posisi yang cukup kuat untuk menjalankan program secara mandiri.

Kelemahan kapasitas lembaga semakin diperparah oleh kondisi sarana dan prasarana yang terpusat sepenuhnya di BPBD, di mana berdasarkan data yang diperoleh seluruh peralatan seperti 5 unit perahu motor, 32 unit alat dayung, 80 unit pelampung rompi, 1 unit mesin sedot air, dan 15 unit tenda berada di bawah kendali BPBD sehingga kelurahan tidak memiliki aset operasional sendiri. Kondisi ini tidak hanya tidak efisien tetapi juga mengandung risiko serius dalam situasi darurat karena kelurahan harus meminjam terlebih dahulu setiap kali akan mengadakan latihan atau menghadapi bencana, yang berarti kelurahan selalu berada dalam posisi reaktif bukan proaktif. Selain faktor dari luar, kelemahan internal di kelurahan juga membuat kemandirian program sulit terwujud karena pelatihan yang diterima anggota masih didominasi seminar dan teori sehingga kemampuan teknis untuk merespons bencana secara mandiri belum matang. Belum adanya kaderisasi untuk meneruskan pengetahuan dari pengurus senior kepada yang lebih muda juga menjadi persoalan serius karena jika pengurus inti tidak aktif program berpotensi terhenti karena tidak ada pengganti yang siap mengambil alih..

BPBD Kota Serang perlu menyusun peta jalan kemandirian yang bertahap dan realistis, dimulai dari pendampingan intensif dengan target yang terukur, dilanjutkan dengan mendorong kelurahan untuk menyusun rencana kerja dan kontinjensi secara mandiri, hingga pada fase akhir di mana kelurahan mampu menyelenggarakan simulasi dan pelatihan tanpa harus menunggu inisiatif dari BPBD. Langkah konkret yang dapat dilakukan adalah menyusun Standar Operasional Prosedur penanganan bencana tingkat kelurahan yang sederhana dan dapat dijalankan tanpa kehadiran BPBD, serta memberikan pelatihan manajemen bencana secara khusus kepada pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kelurahan Kasemen. Dengan demikian kelurahan memiliki panduan yang jelas dan kemampuan yang cukup untuk mengelola program secara mandiri tanpa harus menunggu arahan dari pihak luar, sehingga proses penguatan kapasitas lembaga dapat dipantau dan dievaluasi secara rutin. Pendekatan yang terstruktur seperti ini akan benar-benar mengarah pada kemandirian yang

berkelanjutan sebagaimana yang dikehendaki oleh teori keberlanjutan program Bamberger dan Cheema (1990).

3.3. Pengelolaan Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya menjadi dimensi paling kritis dalam keberlanjutan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen, karena keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya program tersebut tetapi juga pada bagaimana sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara tepat sesuai kebutuhan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, anggaran untuk program Kelurahan Tangguh Bencana di Kasemen memang terbatas dan sebagian besar berasal dari APBD Kota Serang, sementara Camat Kasemen mengonfirmasi bahwa anggaran pelatihan sepenuhnya berasal dari BPBD karena kecamatan belum memiliki anggaran khusus untuk membiayai program ini. Pernyataan yang paling mengungkap kondisi nyata di lapangan datang dari Lurah Kasemen yang secara tegas menyatakan bahwa kelurahan tidak memiliki anggaran untuk program ini dan lebih mengandalkan semangat kekeluargaan serta menunggu pemberitahuan dari BPBD apabila ada pelatihan atau simulasi yang akan diselenggarakan. Jika dikaji menggunakan teori keberlanjutan program Bamberger dan Cheema (1990), kondisi ini merupakan cerminan dari kegagalan dalam dimensi pengelolaan sumber daya yang menjadi salah satu penyangga utama keberlanjutan program, karena banyak program yang sesungguhnya berjalan baik di awal kemudian perlahan mati karena sumber dayanya habis tanpa ada perencanaan untuk menjaganya tetap tersedia..

Ketiadaan anggaran mandiri di tingkat kelurahan secara langsung berdampak pada tidak dapat dilakukannya kegiatan pelatihan secara rutin, tidak dapat diadakannya peralatan secara mandiri, dan seluruh inisiatif program yang bergantung sepenuhnya pada jadwal yang ditetapkan oleh BPBD sehingga dampaknya diakui secara langsung oleh Kepala BPBD bahwa ketika pelatihan jarang dilakukan anggota cenderung lupa prosedur dan cara penggunaan peralatan pada saat bencana benar-benar terjadi. kesiapsiagaan masyarakat dalam program penanggulangan bencana bersifat tidak permanen dan terus berubah sesuai intensitas dukungan yang diterima, sehingga ketiadaan pelatihan rutin akibat keterbatasan anggaran secara langsung menurunkan kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi bencana (Hutagalung, 2023). Pernyataan Lurah Kasemen yang menyebutkan bahwa kelurahan lebih mengandalkan kekeluargaan dalam menjalankan program perlu dipahami bukan sebagai bentuk kearifan lokal yang memadai, melainkan sebagai indikasi lemahnya institusionalisasi program di tingkat kelurahan karena solidaritas spontan berbasis kekeluargaan tidak dapat menjamin ketersediaan sumber daya secara konsisten pada saat dibutuhkan. Kondisi ini semakin kritis bila mempertimbangkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kota Serang sendiri masih sangat terbatas yakni hanya terdiri dari 5 unit perahu motor, 80 pelampung rompi, dan 15 unit tenda untuk melayani 35 kelurahan tangguh bencana yang telah terbentuk, sehingga ketergantungan kelurahan terhadap BPBD mengandung risiko tersendiri. Artinya ketika kapasitas BPBD mengalami keterbatasan maka seluruh program di bawahnya ikut terdampak secara bersamaan, dan kondisi ini persis dengan apa yang terjadi di Kelurahan Kasemen.

Meskipun demikian terdapat sejumlah potensi sumber daya yang sesungguhnya sudah tersedia namun belum dioptimalkan secara maksimal, yaitu struktur organisasi Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen yang telah terbentuk dengan cukup lengkap mencakup tim operator, administrasi, sarana dan prasarana, dokumentasi, serta tim evaluasi dengan lebih dari 30 anggota yang merupakan aset program paling bernilai karena tidak bergantung pada anggaran eksternal untuk diaktifkan. Jaringan komunikasi melalui grup WhatsApp Kelurahan Tangguh Bencana yang sudah aktif digunakan untuk pelaporan bencana juga dapat dioptimalkan lebih lanjut sebagai media sosialisasi mandiri dan distribusi materi pelatihan tanpa memerlukan biaya tambahan. Dari sisi

pendanaan, pelatihan kebencanaan berpotensi untuk diintegrasikan ke dalam pos pemberdayaan masyarakat dalam anggaran kelurahan sehingga program ini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada alokasi dari BPBD dan kelurahan memiliki kendali penuh atas keberlangsungan programnya sendiri. Dengan demikian keberlanjutan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen memerlukan pergeseran pendekatan dari ketergantungan pada pendanaan eksternal menuju pemanfaatan modal sosial dan kelembagaan yang sudah ada sebagai fondasi kemandirian program dalam jangka panjang.

3.4 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan dimensi yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan Program Kelurahan Tangguh Bencana karena sebuah program tidak cukup hanya dilaksanakan tetapi juga perlu dinilai apakah pelaksanaannya benar-benar efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, evaluasi pasca bencana sudah menjadi bagian dari tindak lanjut program di mana Kepala Pelaksana BPBD, Camat Kasemen, dan Lurah Kasemen seluruhnya menyatakan bahwa evaluasi dilakukan setiap kali terjadi bencana untuk mengidentifikasi kekurangan dan menentukan langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Selain itu transparansi pelaporan hasil evaluasi juga sudah berjalan cukup baik melalui berbagai saluran komunikasi seperti grup WhatsApp Kelurahan Tangguh Bencana, media sosial BPBD, dan website resmi BPBD Kota Serang yang memungkinkan masyarakat mengetahui kondisi terkini dan perkembangan program. Namun jika dikaji lebih dalam menggunakan teori keberlanjutan program Bamberger dan Cheema (1990), pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam program Keltana di Kelurahan Kasemen masih jauh dari memenuhi syarat keberlanjutan yang sesungguhnya karena pemantauan yang baik bukan hanya mengukur output fisik tetapi juga harus melihat apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, evaluasi yang berjalan selama ini bersifat reaktif dan bukan partisipatif karena evaluasi hanya dilakukan setelah bencana terjadi dalam bentuk diskusi internal atau laporan yang dibagikan ke pihak terkait, sehingga masyarakat hanya menjadi penerima informasi bukan peserta aktif dalam proses evaluasi. Evaluasi yang bersifat reaktif mengandung kelemahan mendasar karena ia hanya bekerja ketika bencana sudah terjadi, sementara pelemahan kesiapsiagaan yang berlangsung perlahan seperti menurunnya keaktifan anggota, rusaknya peralatan yang tidak diganti, atau melemahnya pengetahuan warga akibat pelatihan yang tidak rutin tidak akan terdeteksi sampai situasi darurat benar-benar datang mengujinya. Tidak adanya jadwal evaluasi yang terprogram secara berkala juga menjadi celah serius dalam dimensi ini karena jika dalam suatu periode tidak ada bencana besar maka evaluasi program pun tidak dilakukan padahal program tetap berjalan atau justru tidak berjalan sepanjang waktu. Tidak adanya dokumentasi evaluasi yang sistematis dan terstandar memperparah kondisi ini lebih jauh, karena tanpa format baku yang mencatat siapa yang hadir, apa yang ditemukan, apa rekomendasinya, dan siapa yang bertanggung jawab menindaklanjuti, hasil evaluasi tidak bisa dibandingkan antar periode dan mudah hilang ketika terjadi pergantian pengurus atau lurah.

Permasalahan berikutnya adalah pelaporan evaluasi yang terlalu bergantung pada saluran digital menyebabkan warga yang tidak memiliki smartphone, tidak melek digital, atau tidak memiliki akses internet secara otomatis terputus dari informasi evaluasi, padahal kelompok lansia, warga miskin, dan perempuan di wilayah pesisir yang justru merupakan kelompok paling rentan bencana adalah yang paling mungkin tidak terjangkau oleh saluran komunikasi ini. Yang menjadi perhatian lebih lanjut adalah mata rantai yang putus antara hasil evaluasi dan kebijakan konkret, di mana evaluasi sudah dilakukan dan laporan dibuat tetapi tidak ada penjelasan tentang bagaimana rekomendasi evaluasi berujung pada perubahan nyata dalam program sehingga evaluasi berhenti sebagai formalitas belaka.

Untuk mengatasi hal ini, rekomendasi evaluasi harus masuk ke dalam perencanaan anggaran secara eksplisit dan setiap rekomendasi perlu ditulis dengan jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab menindaklanjuti, apa tindakan spesifiknya, dan kapan batas waktunya agar rekomendasi tidak hanya menjadi catatan yang tidak dieksekusi. Penyampaian hasil evaluasi juga perlu dilengkapi dengan mekanisme non-digital seperti pertemuan warga di tingkat RT dan RW sehingga seluruh lapisan masyarakat termasuk warga yang tidak memiliki akses teknologi dapat terlibat aktif dalam proses perbaikan program secara berkelanjutan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen yang telah terbentuk sejak tahun 2018 belum berjalan secara berkelanjutan pada keempat dimensi teori keberlanjutan program menurut Bamberger dan Cheema (1990), yaitu partisipasi masyarakat, kapasitas lembaga, pengelolaan sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi. Sama halnya dengan temuan Lutfi dan Magriasti (2024) yang menemukan bahwa program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Padang juga belum sepenuhnya efektif akibat keterbatasan anggaran, kekurangan personel, serta lemahnya pemantauan dan evaluasi formal, penelitian ini menemukan kondisi yang serupa di Kelurahan Kasemen di mana ketiga persoalan tersebut juga hadir secara bersamaan dan saling memperlemah satu sama lain. Temuan ini memperkuat penelitian Lutfi dan Magriasti (2024) bahwa hambatan struktural berupa keterbatasan anggaran dan lemahnya sistem evaluasi merupakan persoalan yang bersifat lintas daerah dan bukan hanya persoalan lokal di satu wilayah saja, sehingga diperlukan perubahan kebijakan yang lebih sistemik di tingkat nasional.

Dari dimensi partisipasi masyarakat, temuan ini memperkuat penelitian Danar et al. (2022) yang menemukan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama Program Desa Tangguh Bencana di Desa Sirnoboyo. Penelitian ini menemukan hal yang sama di Kelurahan Kasemen, di mana partisipasi masyarakat masih bersifat pasif karena seluruh kegiatan pelatihan dan sosialisasi dirancang sepenuhnya secara top-down oleh BPBD tanpa memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam tahap perencanaan. Berbeda dengan temuan Danar et al. (2022) yang menemukan bahwa keterbatasan kapasitas tim relawan menjadi faktor utama rendahnya partisipasi, penelitian ini menemukan bahwa akar persoalan di Kelurahan Kasemen lebih bersumber dari tidak adanya mekanisme pelibatan masyarakat sejak awal perencanaan program, sehingga masyarakat tidak merasa memiliki program dan motivasi untuk terlibat aktif pun melemah dengan sendirinya.

Dari dimensi kapasitas lembaga, berbeda dengan temuan Arifa dan Manurung (2022) yang menemukan bahwa kelemahan kapasitas BPBD Kota Medan dalam program Keltana di Kelurahan Aur lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan pelatihan relawan dan minimnya fasilitas pendukung, penelitian ini menemukan bahwa kelemahan kapasitas di Kelurahan Kasemen bersumber dari persoalan yang lebih mendasar, yaitu tidak adanya desentralisasi kewenangan dan anggaran yang nyata dari BPBD kepada kelurahan. Kondisi ini menyebabkan kelurahan tidak pernah benar-benar disiapkan untuk mandiri karena seluruh aspek program mulai dari perencanaan kegiatan, pengadaan peralatan, hingga pendanaan masih sepenuhnya ditentukan dan disediakan oleh BPBD. Temuan ini menolak asumsi bahwa kelemahan kapasitas lembaga semata-mata merupakan persoalan teknis berupa kekurangan pelatihan atau fasilitas, karena penelitian ini membuktikan bahwa akar permasalahannya justru bersifat struktural, yakni ketergantungan yang terbangun sejak awal pembentukan program akibat tidak adanya pelimpahan tanggung jawab secara nyata kepada kelurahan.

Dari dimensi pengelolaan sumber daya, sama halnya dengan temuan Humaeroh (2025) yang menemukan bahwa keterbatasan alokasi anggaran dan minimnya infrastruktur pendukung seperti jalur evakuasi permanen menjadi hambatan utama keberhasilan Program Desa Tangguh Bencana di

Kabupaten Pandeglang, penelitian ini juga menemukan bahwa Kelurahan Kasemen menghadapi persoalan anggaran yang serupa. Namun berbeda dengan temuan Humaeroh (2025) yang menggambarkan anggaran yang terbatas, penelitian ini menemukan kondisi yang lebih kritis, yaitu Kelurahan Kasemen sama sekali tidak memiliki anggaran mandiri untuk program ini karena seluruh pembiayaan bertumpu sepenuhnya pada BPBD yang kapasitasnya pun sangat terbatas untuk melayani 35 kelurahan tangguh bencana yang telah terbentuk di Kota Serang. Ketiadaan anggaran mandiri ini secara langsung menyebabkan pelatihan tidak dapat dilakukan secara rutin, peralatan tidak dapat diadakan secara mandiri, dan seluruh inisiatif program bergantung penuh pada jadwal yang ditetapkan oleh BPBD.

Dari dimensi pemantauan dan evaluasi, temuan ini memperkuat penelitian Lutfi dan Magriasti (2024) bahwa kurangnya pemantauan dan evaluasi formal menjadi salah satu faktor yang mempersulit penilaian dampak jangka panjang program. Penelitian ini menemukan bahwa evaluasi di Kelurahan Kasemen hanya dilakukan secara reaktif setelah bencana terjadi, tanpa jadwal yang terprogram secara berkala dan tanpa mekanisme tindak lanjut yang jelas. Berbeda dengan temuan Hidayat et al. (2024) yang menemukan bahwa masyarakat di lokus penelitiannya sudah menunjukkan kesiapsiagaan yang cukup baik meskipun masih terkendala pada dukungan finansial dan infrastruktur, penelitian ini justru menemukan bahwa di Kelurahan Kasemen pelemahan kesiapsiagaan masyarakat berlangsung secara perlahan dan tidak terdeteksi justru karena tidak adanya sistem pemantauan yang berjalan secara rutin, sehingga masalah baru disadari setelah situasi darurat benar-benar terjadi dan sudah terlambat untuk diperbaiki.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat dan sekaligus memperluas temuan penelitian-penelitian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa keempat kelemahan dimensi keberlanjutan program di Kelurahan Kasemen tidak berdiri sendiri melainkan saling menguatkan satu sama lain: ketika masyarakat tidak berpartisipasi aktif, lembaga kehilangan legitimasi di lapangan; ketika lembaga tidak memiliki kapasitas mandiri, sumber daya tidak terkelola dengan benar; ketika sumber daya habis, kegiatan berhenti dan masyarakat semakin menjauh; dan ketika tidak ada pemantauan yang rutin, semua persoalan tersebut baru disadari setelah terlambat. Oleh karena itu, keberlanjutan program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen tidak dapat terwujud tanpa pergeseran mendasar dari pendekatan top-down menuju desentralisasi kewenangan, anggaran, dan kapasitas teknis kepada kelurahan, disertai mekanisme evaluasi yang partisipatif, rutin, dan benar-benar ditindaklanjuti.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan bahwa hambatan utama dalam keberlanjutan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen bersumber dari dua faktor yang saling berkaitan yaitu faktor internal berupa kurangnya kontinuitas pelatihan yang menyebabkan warga lupa prosedur dan cara penggunaan peralatan saat bencana terjadi, serta faktor eksternal berupa keterbatasan anggaran yang membuat pelaksanaan program bergantung sepenuhnya pada APBD Kota Serang dan dukungan BPBD. Keterbatasan anggaran dan kurangnya pelatihan rutin saling terkait di mana anggaran yang terbatas membatasi kemampuan untuk melaksanakan pelatihan yang lebih sering dan lebih mendalam, yang pada gilirannya mengurangi kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana secara nyata. Peneliti juga menemukan bahwa upaya pemerintah daerah melalui BPBD Kota Serang sebenarnya telah menunjukkan komitmen yang positif melalui penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta penyediaan peralatan kebencanaan, namun seluruh upaya tersebut masih berpola dari atas ke bawah tanpa disertai pelimpahan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber daya kepada kelurahan secara nyata. Temuan ini menunjukkan bahwa agar upaya pemerintah memberikan dampak jangka

panjang, diperlukan pergeseran pendekatan dari sekadar memberikan bantuan menjadi membangun kapasitas kelurahan untuk dapat mengelola programnya sendiri secara mandiri dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten belum berjalan secara optimal ditinjau dari empat dimensi teori keberlanjutan program menurut Bamberger dan Cheema (1990), di mana partisipasi masyarakat masih bersifat pasif karena program dirancang sepenuhnya secara top-down oleh BPBD tanpa pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, kapasitas lembaga belum mandiri karena kelurahan masih sangat bergantung pada arahan teknis dan peralatan dari BPBD, pengelolaan sumber daya menjadi dimensi paling kritis karena kelurahan tidak memiliki anggaran mandiri dan seluruh pembiayaan bertumpu sepenuhnya pada BPBD, serta pemantauan dan evaluasi hanya dilakukan secara reaktif setelah bencana terjadi tanpa jadwal yang terprogram dan tanpa tindak lanjut yang nyata. Keempat kelemahan tersebut saling menguatkan satu sama lain dan menjadi akar dari tidak berjalannya program secara berkelanjutan, terbukti dari masih berulangnya bencana banjir yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar meskipun program telah terbentuk sejak tahun 2018. Upaya pemerintah daerah melalui BPBD Kota Serang dalam menjaga keberlanjutan program telah mencakup penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta penyediaan peralatan kebencanaan, namun seluruh upaya tersebut masih berpola dari atas ke bawah tanpa disertai pelimpahan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber daya kepada kelurahan secara nyata sehingga program tidak mengakar di tingkat komunitas. Oleh karena itu, keberlanjutan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Kasemen tidak dapat terwujud tanpa pergeseran mendasar dari pendekatan top-down menuju desentralisasi kewenangan, anggaran, dan kapasitas teknis kepada kelurahan disertai mekanisme evaluasi yang partisipatif, rutin, dan benar-benar ditindaklanjuti dengan perubahan nyata dalam program.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama berupa waktu dan biaya penelitian, serta penelitian yang hanya dilakukan pada satu kelurahan saja yaitu Kelurahan Kasemen sebagai lokus penelitian, sehingga temuan yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasikan secara langsung kepada seluruh kelurahan tangguh bencana yang ada di Kota Serang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian ini, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada kelurahan tangguh bencana lainnya di Kota Serang maupun di daerah lain dengan karakteristik kebencanaan yang serupa, guna memperoleh hasil yang lebih mendalam dan dapat dibandingkan secara lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Lurah Kasemen beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arifa, K., & Manurung, R. K. (2022). Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KotaMedan Dalam Program Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA) DiKelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun. *Professional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, *9*(2), 355–

364. https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/3316/2724
Arifin, S., Wicaksono, S. S., Sumarto, S., Martitah, M., & Sulistianingsih, D. (2021). Disaster resilient village-based approach to disaster risk reduction policy in Indonesia: A regulatory analysis. *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies*, *13*(1), 1–9. https://doi.org/10.4102/JAMBA.V13I1.1021
Bamberger, M., & Cheema, G. S. (1990). *Case Studies of Project Sustainability : Implications for Policy and Operations From Asian Experience EDI Seminar Series*. https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/693401468759761589
Cantwell-Chavez, D. (2023). Interlocal adaptations to climate in east and southeast Asia: sharing lessons of agriculture, disaster risk reduction, and resource management. In *International Affairs* (Vol. 99, Nomor 3). https://doi.org/10.1093/ia/iiad074
Cao, L. (2023). AI and data science for smart emergency, crisis and disaster resilience. *International Journal of Data Science and Analytics*, *15*(3), 231–246. https://doi.org/10.1007/s41060-023-00393-w
Danar, O. R., Anggriawan, T., & Prameisa, D. (2022). Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana dalam Perspektif Flood Risk Management. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, *4*, 101–110. https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.492
Eviany, E. ; S. (2023). *PERLINDUNGAN MASYARAKAT : Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. PT. Nas Media Indonesia. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1251/1/Sutiyo%20Eva%20perlindungan%20masyarakat.pdf
Ginting, A. H., & Wijayanti, T. D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, *11*(2), 42–57. https://doi.org/10.33701/jtp.v11i2.695
Hidayat, H., Nurcihikita, T., & Giswantoro, P. (2024). Strategi Integratif Untuk Meningkatkan Keselamatan Dan Ketahanan Bencana Banjir Melalui Pelatihan Komunitas Dan Inovasi Konstruksi Berkelanjutan. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, *7*(1), 1–12. https://doi.org/10.35971/jjhsr.v7i1.27625
Humaeroh, S. (2025). *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana : Studi Program " Desa Tangguh Bencana " d i Desa Panimbangjaya , Kabupaten Pandeglang*. *4*(1), 1–10. https://hkpublishing.id/joc/article/view/542
Hutagalung, S. S. (2023). Adaptive capacity in the implementation of disaster response village programme in Indonesia: Literature review. *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies*, *15*(1), 1–7. https://doi.org/10.4102/JAMBA.V15I1.1470
Labolo, M. (2014). *MEMAHAMI ILMU PEMERINTAHAN: suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
Lutfi, A., & Magriasti, L. (2024). Efektivitas Program Kelurahan Tangguh Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(3), 42014–42025.
Nurrahman, A., Sabaruddin, & Salma, R. N. L. (2022). Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP). *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, *2*(2), 106–125. https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1113
Shi, P., Ye, T., Wang, Y., Zhou, T., Xu, W., Du, J., Wang, J., Li, N., Huang, C., Liu, L., Chen, B., Su, Y., Fang, W., Wang, M., Hu, X., Wu, J., He, C., Zhang, Q., Ye, Q., … Okada, N. (2020). Disaster Risk Science: A Geographical Perspective and a Research Framework. *International Journal of Disaster Risk Science*, *11*(4), 426–440. https://doi.org/10.1007/s13753-020-00296-5
Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan : Teoritik- Legalistik-Empirik-Inovatif. Bandung*. Alfabeta.


INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
BHINNEKA TUNGGAL IKA
1956
KEMENTERIAN DALAM NEGERI